

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA
BARANG MILIK DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA
SURABAYA DENGAN PERUSAHAAN ADVERTISING
DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6
TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA ATAU DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

DWI AZIZAH RADITIANI
NPM . 0771010131

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2011**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA BARANG MILIK
DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN
PERUSAHAAN ADVERTISING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA ATAU DAERAH

Disusun oleh :

DWI AZIZAH RADITIANI
NPM. 0771010131

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP . 19 62062199103 1001

Wiwin Yulianingsih, SH., M.Kn
NIP/NPT. 3 7507 07 0225

MENGETAHUI
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP . 19 62062199103 1001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini Penulis mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA BARANG MILIK DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PERUSAHAAN ADVERTISING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA ATAU DAERAH”

Penulisan skripsi ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima. dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna menyusun skripsi

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H.,M.M Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.

2. Bapak Sutrisno, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur.
3. Bapak Subani, S.H., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur.
4. Ibu Wiwin Yulianingsih,SH.,MKn selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan membimbing dan memberikan pengarahan kepada penyusun dengan meluangkan tenaga dan waktunya.
5. Ibu Mas Anienda Tien Fitriyah,SH.,MH selaku dosen wali yang telah membimbing dan mendampingi dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah membantu dalam pelaksanaan dan kelancaran pengerjaan skripsi ini.
8. Bapak Hotlan Marbun Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya yang bersedia mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Agus Winoto selaku Ketua Asosiasi Periklanan Indonesia yang bersedia mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Papa, Ibuk, Mas Andik, Mas Acef, dek Uta, dek Devi, dan Mbak Ninun tersayang yang telah memberikan dorongan serta perhatian untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Untuk Kedua Sahabatku Rina dan Nina yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2007 khususnya Mbak Ita, Isna, Permana, Erik, Arif, serta semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan masukan dalam pembuatan skripsi hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kajian pustaka	6
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	6
1.5.2 Sewa Menyewa.....	10
1.5.3 Jembatan Penyeberangan.....	15
1.5.4 Reklame	16
1.5.5 Wanprestasi	17

1.6	Metode penelitian	19
1.6.1	Jenis Penelitian	19
1.6.2	Pendekatan Masalah	19
1.6.3	Sumber Data	20
1.6.4	Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	21
1.6.5	Metode Analisis Data	22
1.6.6	Sistematika Penulisan	23
 BAB II Bagaimana Tinjauan Yuridis Sewa Menyewa Barang Milik Daerah khususnya yang berkaitan dengan reklame antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak swasta jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006.....		
2.1	Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa barang milik pemerintah dengan pihak swasta dikaji secara yuridis.....	33
 BAB III Upaya apa yang akan dilakukan bila salah satu pihak melakukan wanprestasi.....		
3.1	Upaya Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah kota Surabaya melalui Pengadilan Negeri	41
3.2	Upaya Hukum yang dilakukan pihak swasta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.....	43
3.3	Upaya Hukum yang diselesaikan secara non litigasi oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Pihak Swasta	45
 BAB IV Penutup.....		50

4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : DwiAzizah Raditiani
NPM : 0771010131
Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 26 Maret 1989
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA BARANG MILIK
DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN
PERUSAHAAN ADVERTISING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA ATAU DAERAH**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai perjanjian sewa menyewa barang milik daerah khususnya tentang reklame.

Upaya hukum yang akan dilakukan bila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan dua jenis metode pengumpulan data, yaitu metode studi kepustakaan, metode wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara teknis analisis kualitatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pihak Swasta sudah tepat dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan terhadap para pihak yang mengalami dan terlibat langsung dengan judul ini.

Kata Kunci : Perjanjian, Sewa menyewa, upaya hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat juga menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang. Pemanfaatan aset dalam struktur pendapatan daerah termasuk dalam rincian objek hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola dapat didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya biaya pemeliharaan (selanjutnya disingkat dengan APBD).

Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (selanjutnya disingkat dengan PP No.6 Tahun 2006) yang mengatur adalah tidak sekedar administratif semata, juga untuk menangani aset negara, dengan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan

pengendalian. Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (selanjutnya disingkat dengan PERMENDAGRI No 17 Tahun 2007) yang mengatur Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
- d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan
- f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara atau daerah dan kepentingan umum. Bentuk atau pola pemanfaatan barang milik daerah

berupa: Sewa; Pinjam Pakai; Kerjasama Pemanfaatan; Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Pertimbangan untuk Menyewakan Barang Milik Negara Penyewaan Barang Milik Negara dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara yang belum atau tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga, atau mencegah penggunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain secara tidak sah.

Cara untuk meningkatkan pendapatan daerah Pemerintah Kota Surabaya dapat menyewakan aset-aset atau fasilitas yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada pihak swasta, salah satunya adalah menyewakan Jembatan penyeberangan. Menurut Pasal 1 angka 9 PP No.6 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut:

Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara atau daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Sedangkan menurut PERMENDAGRI No 17 Tahun 2007 pasal 1 angka 19 :

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

Menurut pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer) sewa menyewa adalah :

Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Reklame atau sekarang lebih dikenal dengan iklan, mempunyai sejarah panjang. Iklan mulai dikenal pada zaman Yunani kuno. Sejak awal periklanan mempunyai kaitan yang kompleks dengan berbagai perkembangan bidang-bidang \am. Antara \am Vnding-bidang, industri, komunikasi, atau antara perdagangan dan informasi. Atau juga bisa berhubungan dengan hukum perjanjian mengenai sewa rr.enyewa reklame dan sebagainya. Contoh paling baik tentang perubahan dan perkembangan metode periklanan dimulai saat terjadi revolusi industri di Inggris, yang segera pula membawa perubahan di bidang komunikasi. Kemunculan produk-produk manufaktur berskala besar menjadikan periklanan sebagai kebutuhan mutlak bagi perkembangan ekonomi negara. Perkembangan periklanan saat itu pun umumnya terkait langsung dengan pertumbuhan perdagangan. Namun unsur perpajakan dalam periklanan ternyata berperan pula dalam mendorong ataupun menghambat perkembangannya. Industri periklanan Indonesia sudah tumbuh sedemikian rupa, bahkan ikut andil dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Klasik. Itulah sebutan yang pantas terhadap permasalahan reklame di Surabaya. Sebab, sudah bertahun-tahun masalah reklame itu tak kunjung tuntas. Salah satu masalah besar yang kini melanda adalah banyaknya reklame yang rawan roboh di saat musim penghujan tiba. Lagi-lagi warga jadi korbannya. Kondisi tersebut akan terus terulang, pemicunya tak lepas dari banyaknya permasalahan reklame di Surabaya. Mulai 'kenakalan' para

pengusaha di biro reklame, lemahnya pengawasan hingga keterbatasan dana dan masalah pembongkarannya. Selain, pemasangannya yang semrawut sehingga mengganggu estetika kota dan mengurangi ruang terbuka hijau, pemasangannya cenderung mengutamakan keuntungan pengusaha reklame.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa perumusan masalah untuk dipakai sebagai skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana Tinjauan Yuridis Sewa Menyewa Barang Milik Daerah khususnya yang berkaitan dengan reklame antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak swasta jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006?
- b. Upaya apa yang akan dilakukan bila salah satu pihak melakukan wanprestasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui tinjauan yuridis perjanjian sewa yang diberikan kepada Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak swasta
- b. Upaya hukum pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat praktis :

Agar masyarakat dapat mengetahui bahwa dalam prakteknya fasilitas umum yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya bisa dimanfaatkan untuk pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Manfaat teoritis :

Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Hukum dibidang ilmu hukum dan hukum perdata pada khususnya mengenai peraturan perundang-undaiigan tentang sewa menyewa yang selama ini objeknya adalah milik pribadi dan berkembang bahwa objeknya bisa merupakan milik umum atau suatu instansi pemerintahan.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.

a. Pengertian perjanjian

Buku III KUHPer memiliki sifat yang terbuka. Maksudnya, bagi para pihak yang ingin membuat suatu perikatan atau perjanjian, bebas menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam buku III KUHPer, asalkan isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertitan umum. Dalam Buku III KUHPer tersebut tercantum definisi perjanjian yaitu didalam Pasal 1313 : suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.. Namun demikian, definisi Perjanjian dapat ditemukan dalam doktrin (Ilmu Pengetahuan Hukum), diantaranya pendapat.

"Perjanjian adalah suatu peristiwa, di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".¹

"Pejanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan".²

"Perjanjian adalah suatu hubungan Hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi."³

b. Lahirnya Perjanjian

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak, mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain. Meskipun tidak sejurus, tetapi secara timbal balik, kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.⁴

c. Asas-Asas dalam Perjanjian

Hukum perjanjian mengenai beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut antara lain :

a. Asas konsensual

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-

¹ Subekti, "*Hukum Perjanjian*", PT Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 1

² Abdulkadir Muhammad., "*Hukum Perdata Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, hal. 225

³ M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung : 1986, hal. 6

⁴ Ibid, hal. 26

pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Per yang berbunyi : (salah satu syarat syahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak). Hal ini mengandung makna bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban uraum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

c. Asas Pelengkap

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya menghendaki hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

d. Asas Pacta Sun Servanda

Asas ini memiliki kekuatan yang mengikat. Hal ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : (Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya).⁵

e. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), telah dinyatakan mengenai beberapa ketentuan tentang perjanjian. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian yaitu antara lain:

- a. Pasal 1320 : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan . empat syarat:
 - 1) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) Suatu hal tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang halal;
- b. Pasal 1330 : tak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:
 - 1) Orang-orang yang belum dewasa
 - 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan
 - 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tetentu.
- c. Pasal 1338 ayat (1) : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian hams dilaksanakan dengan itikad baik.

⁵ Abdulkadir Muhammad *Op.cit*, hal. 225

f. Berakhirnya Suatu Perjanjian Dan Hapusnya Perikatan

a. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena suatu tindakan atau peristiwa tertentu, baik yang dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh para pihak. Hal tersebut antara lain :⁶

- 1) Telah ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.
- 2) Undang-undang telah menetapkan batas waktu berlakunya perjanjian.
- 3) Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus.
- 4) Adanya suatu pernyataan untuk menghentikan perjanjian.
- 5) Karena putusan hakim.
- 6) Tujuan perjanjian telah tercapai.

b. Hapusnya Perikatan

Menurut ketentuan pasal 1381 KUHPdata, terdapat sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu:

- 1) Pembayaran
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan, atau penitipan.
- 3) Pembaharuan utang
- 4) Perjuinpaan utang atau kompensasi
- 5) Percampuran utang
- 6) Pembebasan utang
- 7) Musnahnya barane vane terutane
- 8) Pembatalan
- 9) Berlaku suatu syarat batal
- 10) Lewatnya waktu (daluarsa)

1.5.2 Sewa Menyewa

a. Pengertian Sewa

Menurut pasal 1548 KUHPer sewa menyewa adalah :

Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

⁶ Subekti *Op.cit*, hal. 22

Sedangkan menurut PERMENDAGRI No 17 Tahun 2007 pasal 1 angka 19 :

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

Menurut Pasal 1 angka 9 PP No.6 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut:

Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara atau daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.⁷

Menurut kamus hukum, sewa menyewa adalah suatu persetujuan dalm mana pihak yang satu menyanggupi dirinya untuk menyerahkan suatu kebsndaan kepada pihak yang lain agar pihak ini dapat menikmatinya untuk suatu janka waktu tertentu dan atas penerimaan sejumlah uang tertentu pula, uang mana pihak yang beakangan ini sanggup membayamya. Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang.

Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan

⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung :1979, h. 51

barang atau benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.⁸ Sewa menyewa sama halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian kensual.⁹

b. Perjanjian Sewa-menyewa

"Perjanjian sewa menyewa adalah dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupikan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan".¹⁰

"Perjanjian sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini pembayarannya".¹¹

Menurut PP No.6 Tahun 2006 dinyatakan bahwa :

Pasal 21

- (1) Penyewaan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan bentuk:
 - a. Penyewaan barang milik negara atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang;

⁸ Salim H.S.,SH., M.S *Hukum Kontrak* : Sinar Grafika, Jakarta : 2010, h 59

⁹ Subekti, S.H. *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1995, h 39

¹⁰ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, Intermasa, Jakarta :2005 h. 164

¹¹ A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian* : Liberty Yogyakarta, Yogyakarta :1985, h 60

- b. Penyewaan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/walikota;
 - c. Penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
 - d. Penyewaan atas barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyewaan atas barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang.
 - (3) Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.
 - (4) Penyewaan atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dan d, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Pasal 22

- (1) Barang milik negara/daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan negara/daerah.
- (2) Jangka waktu penyewaan barang milik negara/daerah paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. barang milik negara oleh pengelola barang;
 - b. barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.
- (4) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah.

c. Jenis Barang Milik Negara/Daerah yang dapat disewakan.

Tanah, Jembatan Penyeberangan Umum, Gedung dan semua jenis Barang Milik Negara/Daerah kecuali yang bersifat khusus dan menjadi rahasia negara dapat disewakan.¹²

d. Pihak yang dapat menyewakan Barang Milik Negara/Daerah.

Yang dapat menyewakan Barang Milik Negara/Daerah adalah Pengelola dan Pengguna Barang.

- 1) Pengelola Barang dapat menyewakan tanah dan atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang.
- 2) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang dapat menyewakan:
 - a. Sebagian tanah dan bangunan yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang;
 - b. Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan atau bangunan.

e. Pihak yang dapat menyewa Barang Milik Negara/Daerah.

Semua pihak, baik Badan Hukum maupun perorangan dapat menyewa Barang Milik Negara/Daerah.

f. Ketentuan dalam penyewaan Barang Milik Negara/Daerah.¹³

- 1) Yang disewakan adalah Barang Milik Negara/Daerah.
- 2) Jangka waktu penyewaan maksimum 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan waktu penyewaan oleh Pengelola Barang dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi oleh Pengelola Barang. Penyewaan oleh Pengguna Barang, perpanjangan waktu penyewaannya dilakukan setelah dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang.

g. Menurut PP No.6 Tahun 2006 pasal 21 Penyewaan Barang

Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan bentuk:

¹² Pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah h. 47

¹³ Modul Pengelolaan Barang Milik Negara DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA h. 47

- a. Penyewaan barang milik negara atas tanah dan bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang;
- b. penyewaan barang milik daerah atas tanah dan bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/walikota;
- c. penyewaan atas sebagian tanah dan bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang;
- d. penyewaan atas barang milik negara/daerah selain tanah dan bangunan.

1.5.3 Jembatan Penyeberangan

Jembatan adalah bangunan pelengkap jalan yang berfungsi melewatkan lalu lintas yang terputus pada kedua ujung jalan akibat adanya hambatan berupa sungai, saluran, kanal, selat, lembah serta jalan dan jalan kereta api yang menyilang. Sedangkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah jembatan yang letaknya bersilangan dengan jalan raya atau jalur kereta api, letaknya berada di atas kedua objek tersebut, dan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki yang melintas (menyeberang) jalan raya atau jalur kereta api.¹⁴

Jembatan Penyeberangan Orang juga dapat diartikan sebagai fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar, menyeberang jalan tol, atau jalur kereta api dengan menggunakan jembatan tersebut, sehingga alur sirkulasi orang dan lalu lintas kendaraan dipisah secara fisik dan kemungkinan terjadi kecelakaan dapat dikurangi. Jembatan penyeberangan orang adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar atau

¹⁴ <http://fariable.blogspot.com/2010/10/jembatan-penyeberangan-orang.htm> 19/01/2011.08:00 hari rabu

menyeberang jalan to! dengan menggunakan jembatan, sehingga orang dan lalu lintas kendaraan dipisah secara fisik.¹⁵

1.5.4 Reklame

Menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah No 8 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan reklame dan pajak reklame (selanjutnya disingkat dengan PERDA No.8 Tahun 2006) yang berbunyi sebagai berikut:

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.

Menurut kamus hukum, Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk susunan dan atau corak ragamnya, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau seseorang atau pun untuk menarik perhatian umum kepada sesuatu barang, jasa, atau seseorang, yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan didengar, daripada sesuatu tempat oleh umum..

¹⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/jembatan-penyeberangan-orang> 19/01/2011,08:24 hari rabu

Reklame, *advertenti*, atau sekarang lebih dikenal dengan iklan, mempunyai sejarah panjang. Sejak awal periklanan mempunyai kaitan yang kompleks dengan berbagai perkembangan di bidang-bidang lain. Antara lain bidang-bidang industri dan komunikasi, atau antara perdagangan dan informasi. Hal ini perlu diketahui untuk memahami perubahan-perubahan tujuan, pengelolaan, dan metode periklanan pada konteks masing-masing zaman.¹⁶

1.5.5 Wanprestasi

Wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan yaitu dengan tidak memenuhi suatu kewajiban seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :¹⁷

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*) jadi diluar kemampuan debitur, sehingga debitur dianggap tidak bersalah.

Berdasar pada penentuan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Terdapat tiga keadaan, yaitu :¹⁸

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru.

¹⁶ Budi Setiyono, *Reka Reklame*, Galang Pers, Yogyakarta : 2004, h 19

¹⁷ Subekti Op.cit, hal. 203

¹⁸ Ibid, hal. 204

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Guna mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, maka perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi "tidak ditentukan", perlu memperhatikan supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUHPer debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan serdirinya sudah batal demi hukum.¹⁹

Berdasarkan pas 1243 KUHPer yang bunyinya penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Pasal ini bermaksud untuk menjelaskan mengapa seseorang dapat dibebani pembayaran ganti kerugian. Penentuan mulainya penghitungan pembayaran ganti kerugian itu tergantung dari ada tidaknya jangka waktu yang dijadikan patokan untuk kelalaian salah satu pihak.²⁰

¹⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana.2009, Jakarta : h 61

²⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta :2009 h 13

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan.²¹

1.6.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentra/ penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :²²

1. *Comprehensif* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis
2. *All inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada. Sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), akan lebih akurat bila dibantu oleh pendekatan yang lain dalam hal pendekatan tersebut adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang bertujuan untuk mempelajari penerapan-penerapan

²¹ H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 30

²² Ibrahim Jhonny, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, PT Bayu Media Publishing, Malang, 2010, hal. 303

norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.²³

1.6.3 Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana ditemukannya data-data penelitian.²⁴ Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah :

1.6.3.1 Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara terstruktur yang diperoleh peneliti langsung dari objeknya.

1.6.3.2 Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁵ Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum,

²³ Ibid, h. 321

²⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrasindo Persada, Jakarta, 2007, h. 98

²⁵ H. Zainudin Ali, *op.cit.*, h. 106

yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.6.3.3 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- 1.6.3.4 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁶
- 1.6.3.5 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, encyclopedia, dan lain-lain.²⁷

1.6.4 Metode Pengumpulan dan Pengelolaan data

Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

- a) Data primer dikumpulkan dengan cara studi lapangan, yaitu secara wawancara kepada pihak terkait yang dalam hal ini yaitu kepala Perusahaan Periklanan Indonesia, dan staff bagian hukum Pemerintah Kota Surabaya, wawancara tersebut menggali

²⁶ Ibrahim Jhonny, *op.cit.*, h. 296

²⁷ Ibid, h. 296

informasi mengenai perjanjian sewa barang milik daerah dan tentang pelaksanaan reklame di Surabaya.

- b) Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka yaitu dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematiskan, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.²⁸ Dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.

1.6.5 Metode Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁹

Pengkajian deskriptif analitis digunakan untuk menelaah konsep-konsep yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan

²⁸ Ibid, h. 296

²⁹ H. Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 107

penelitian ini. Hal ini sangat berkaitan dengan tugas ilmu hukum normatif (dogmatik) yaitu untuk menelaah, mensistemasi, menginterpretasikan dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku bagi pengkajian tentang pokok masalah.³⁰

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri beberapa sub-sub :

Bab I pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, menguraikan tentang bagaimana tinjauan yuridis sewa menyewa barang milik daerah khususnya yang berkaitan dengan reklame antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak swasta jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2006.

Bab III, menguraikan tentang upaya apa yang akan dilakukan bila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

³⁰ Ibrahim Jhonny, *op.cit.*, h. 36

Bab IV, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

